

PERANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MEMBANTU PARA PENCARI KERJA DI KABUPATEN SAROLANGUN

DAHMI*)
MASITA DEWI**)

*) Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

***) Alumni Prodi Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan populasi sebanyak 75 orang dan sampel sebanyak 5 orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan berupa wawancara dan studi pustaka yaitu dengan membaca, mempelajari dan membandingkan teori literatur- literatur, tulisan dan laporan yang relevan dan erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun yaitu dengan pelayanan kartu kuning, penginformasian lowongan pekerjaan, pelatihan atau pemagangan dan penempatan tenaga kerja.

Kata Kunci : Peranan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pencari Kerja

Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sarolangun hingga saat ini tergolong besar dan kompleks khususnya yang menyangkut pengangguran dan setengah pengangguran yang jumlahnya cukup banyak dari tahun ke tahun (Disnakertrans, 2006). Dalam Harian Tribun Jambi tanggal 24 Juni 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun mencatat angka pengangguran di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan drastis. Kenaikan cukup signifikan itu disebut Kepala BPS Refia melalui Kasi Statistik Sosial Danik Lurisdjati, dipengaruhi faktor ketersediaan lapangan pekerjaan di Sarolangun juga menurun.

Setiap tahunnya para pencari kerja yang terdata di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penyebab utama masalah ini adalah keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia dan rendahnya kualitas angkatan kerja yang ada. Salah satu upaya mendasar dan strategi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana tenaga kerja di berbagai bidang dan tingkatan (Disnakertrans, 2006).

Disamping itu faktor-faktor yang menimbulkan pengangguran adalah menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja dan ketidaksesuaian diantara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri (Sukirno, 2012).

Tabel 1. Pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sarolangun tahun 2011-2013

Tahun	10-29 Tahun		30-54 Tahun		55 Tahun Keatas		Jumlah
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
2011	144	58	31	7	-	1	241
2012	320	177	66	17	-	-	580
2013	439	617	75	70	-	1	1.202

Sumber : Sarolangun Dalam Angka 2014

Pencari kerja yang tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun melalui pembuatan kartu kuning meningkat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.202 orang. Peluang menyelesaikan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan pelaksanaan system pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif memang diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan dan pemerataan pendapatan seluruh masyarakat”. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sadono Sukirno, 2012).

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai (Sukirno, 2012). Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja.

Krisis ekonomi yang dialami di Indonesia sangat berdampak pada masyarakat dan juga memberikan dampak khususnya di bidang Ketenagakerjaan, diantaranya adalah bertambahnya pengangguran akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Perusahaan karena mengalami kerugian atau tidak mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi saat ini dan juga peningkatan taraf kehidupan ekonomi oleh masyarakat yang tidak mudah bagi masyarakat kecil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai

dengan jumlah penganggur semakin banyak, untuk mengatasi dan mengurangi jumlah pengangguran dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia guna meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab atas hal penyerapan pengangguran di Kabupaten Sarolangun. Tugas dan fungsi yang telah dijalankan adalah upaya untuk menanggulangi bertambahnya jumlah pengangguran, program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, dan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Adapun fenomena yang terjadi yaitu hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi pertambahan jumlah pengangguran yang ada yaitu kurangnya kemampuan, keterampilan serta pendidikan sumber daya manusia, kurangnya lapangan kerja sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun ?

Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun.
- b. Menganalisis peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Satori, dkk 2013). Dengan kata lain, yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah semua pegawai yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berjumlah 75 Orang.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua orang, dokumen dan peristiwa- peristiwa (yang ditetapkan oleh peneliti) untuk diamati, diobservasi atau diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian (Satori, dkk 2013). Sampel dalam penelitian ini yaitu 5 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Dinas Sosnakertrans, Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas – Balai Latihan Kerja, Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Kasi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan yaitu dengan terjun langsung kelapangan atau instansi dengan menggunakan metode mengumpulkan data dalam bentuk wawancara. Menurut Sudjana wawancara adalah proses pengumpulan data atau informan melalui

tahap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*) (Satori, dkk 2013).

Study Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan membaca, mempelajari dan membandingkan teori literatur-literatur, tulisan dan laporan yang relevan dan erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data

Analisis data menurut Bog dan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2015). Analisis data diterapkan melalui tiga alur, yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

PEMBAHASAN

Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Membantu Para Pencari Kerja Di Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun, dijelaskan peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja yaitu dengan membuat kartu tanda pendaftaran pencari kerja, penginformasian lowongan pekerjaan, pelatihan atau pemagangan hingga penempatan tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas yaitu sebagai berikut : “Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja yaitu dengan membantu membuat kartu tanda pendaftaran pencari kerja, menginformasikan lowongan pekerjaan di perusahaan melalui pengumuman, radio RSPD Kabupaten Sarolangun dan memberikan informasi secara langsung kepada para pencari kerja”.

Hal senada juga disebutkan Kepala Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja yaitu : “Kami membantu para pencari kerja dengan tidak mempersulit dalam proses pembuatan kartu kuning, kami juga menginformasikan lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja melalui papan pengumuman di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.” Keberadaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan membantu para pencari kerja (Pencaker) untuk mendapatkan pekerjaan, seperti yang disebutkan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yaitu : “Setiap pencaker yang datang untuk membuat kartu kuning data pencari kerja tersebut akan tersimpan dan bilamana ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru mereka yang telah terdaftar bisa dihubungi.

Selain itu juga menurut Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas yaitu : “Para pencari kerja yang telah memiliki kartu kuning akan mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan, pasalnya jika ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka, pihak kami akan menghubungi mereka melalui sms atau telepon” Keberhasilan para pencari kerja dalam mencari pekerjaan sedikit banyaknya ada Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti halnya pendapat Kepala Bidang

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas yaitu : “Ya, tergantung apakah perusahaan tersebut merekrut tenaga kerja bekerjasama dengan dinas atau tidak, karena perusahaan biasanya juga merekrut tenaga kerja sendiri”.

Berikut ini adalah penjabaran data yang diperoleh dari pengamatan langsung tentang hal-hal yang berhubungan dengan peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap para pencari kerja Kabupaten Sarolangun. Hal tersebut antara lain :

Pelayanan Kartu Kuning

Kartu kuning atau sering disebut AK1 merupakan kartu yang diperuntukkan bagi pencari kerja, sekaligus juga sebagai database Depnakertrans/Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mengukur persentase pencari kerja diwilayahnya (Nia Setyarning, 2010).

Kartu kuning berfungsi sebagai salah satu syarat untuk seorang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Bapak Khairil selaku Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas yaitu “Kartu kuning adalah kartu tanda pendaftaran pencari kerja bahwa Tenaga Kerja yang bersangkutan sedang mencari pekerjaan. Syarat pembuatan kartu kuning sebagai berikut :

- a. Foto copy ijazah terakhir 1 lembar
- b. Foto copy transkrip nilai 1 lembar (untuk D1, D II, D III dan S1)
- c. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) 1 lembar
- d. Pas photo ukuran 3x4 2 lembar
- e. Daftar riwayat hidup
- f. Map
- g. Datang sendiri tanpa diwakilkan

Sistem, mekanisme dan prosedur pembuatan kartu kuning :

- a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan AK-1
- b. Petugas meneliti berkas jika sudah lengkap diagendakan
- c. Petugas melakukan wawancara langsung dengan calon pencari kerja d. Petugas membuat kartu AK-1
- e. Penandatanganan kartu kuning (AK-1) oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
- f. Penyerahan kartu kuning (AK-1) kepada pemohon

Berdasarkan paparan Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas sebagai berikut : “Masa berlaku kartu kuning yaitu 2 tahun dan wajib lapor setiap 6 bulan sekali jika si pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan dan jika selama 2 tahun tersebut pencari kerja belum juga mendapatkan pekerjaan maka dia harus memperpanjang kartu kuningnya kembali karena terkadang perusahaan datang ke dinas untuk mencari tenaga kerja yang mereka butuhkan dengan data yang ada di dinas dan langsung menghubungi pencari kerja melalui telepon. Apabila pencari kerja tersebut telah mendapatkan pekerjaan tidak diperpanjang juga tidak apa.”

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perantara antara perusahaan dan para pencari kerja, secara tidak langsung peranan Dinas Sosnakertrans membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan dan hal ini tentu saja dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Salah satu tujuan kenapa para

pencaker harus membuat kartu kuning adalah untuk mengetahui berapa jumlah pengangguran yang ada, mereka yang datang untuk membuat kartu kuning pastilah tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kerja.

Pencari kerja didapat dari pencari kerja yang membuat kartu tanda pendaftaran pencari kerja atau kartu kuning (AK-1). Jumlah pencari kerja di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2014 yang terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebanyak 978 orang yang terdiri dari pencari kerja berpendidikan SD, SLTP, SLTA, DI-DII, D III, S1 dan S2. Pencari kerja terbanyak berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 569 orang dan jumlah pencari kerja terendah yaitu pada tingkat pendidikan SD dan S2 yaitu masing-masing sebanyak 5 orang.

Informasi Pasar Kerja atau Informasi Ketenagakerjaan

Informasi pasar kerja (IPK) adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja (Nia Setyaming, 2010). Penginformasian lowongan kerja dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui papan pengumuman yang tersedia di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui radio RSPD Kabupaten Sarolangun dan memberitahu langsung kepada para pencari kerja. Seperti halnya penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas berikut : “penginformasiannya bisa melalui papan pengumuman, melalui bursa kerja online (sekarang tidak aktif), melalui radio RSPD, dan diberitahu langsung kepada pencaker”. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja yaitu : “Lowongan pekerjaan kita umumkan melalui papan pengumuman dan juga ketika ada pencaker yang membuat kartu kuning kita beritahukan langsung ke mereka kalau ada lowongan pekerjaan”

Jumlah lowongan kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebanyak 522 orang. Berikut nama- nama instansi atau perusahaan yang merekrut tenaga kerja di Kabupaten Sarolangun.

Pelatihan dan Pemagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 9, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas - Balai Latihan Kerja “Pelatihan kerja dilakukan untuk membantu masyarakat yang putus sekolah, yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai keahlian atau keterampilan. Mereka dilatih selama 30 hari atau satu bulan untuk belajar seperti menjahit, mengemudi, tata rias, mengelas, komputer, service TV dan lain-lain.” Selanjutnya disebutkan pada angka 11, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Penuturan dari Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu : “Program pemagangan di perusahaan dilakukan agar tenaga kerja bisa mengasah keterampilan yang ada

pada diri mereka untuk mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif”.

Penempatan Tenaga Kerja

Sesuai dengan salah satu tugas Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, program penempatan tenaga kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu melaksanakan pelayanan penempatan kerja melalui :

a. Program AKL (Antar Kerja Lokal)

Yaitu salah satu bentuk mekanisme pelayanan program tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dari satu wilayah kabupaten/kota ke wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi. Prosedur mekanisme pelayanan AKL yang dilayani harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- b) Kartu tanda penduduk
- c) Foto copy ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki
- d) Foto copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki

b. AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)

Adalah antar kerja antar kakanwil Depnaker dalam wilayah Indonesia. AKAD dilaksanakan oleh Depnaker atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS). Setiap pemberi kerja atau pelaksana yang akan melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui AKAD harus memiliki surat persetujuan penempatan (SPP), SPP ini masa berlakunya paling lama 1 tahun sejak diterbitkan dan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Tenaga kerja yang mengikuti penempatan melalui program AKAD harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Usia minimal 18 tahun
- b) Memiliki kartu tanda penduduk
- c) Sehat mental dan fisik
- d) Memenuhi kualitas sesuai dengan permintaan
- e) Lulus tes tertentu apabila disyaratkan.

Antara pencari kerja dengan pemberi kerja harus ada perjanjian kerja sebelum menandatangani perjanjian kerja dan tidak boleh diwakilkan. Sebelum pemberangkatan pelaksana bersama-sama Kandepnaker daerah asal melakukan penyuluhan kepada pencari kerja yang meliputi : informasi pekerjaan, penjelasan situasi dan kondisi tempat kerja, penjelasan tentang hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerja.

c. AKAN (Antar Kerja Antar Negara)

Merupakan sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai bakat, minat dan kemampuannya dalam hubungan kerja diluar negeri. Para pekerjaanya lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). TKI adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan tenaga kerja di Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan penempatan PJTKI wajib memiliki dokumen yang memuat : perjanjian kerja penempatan, Surat permintaan TKI atas PJTKI yang bersangkutan, perjanjian kerja dan perjanjian penempatan TKI. Sebelum pemberangkatan TKI diberi penyuluhan oleh instansi kabupaten/kota, PJTKI dan instansi terkait mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia beserta uraian tugas,

syarat-syarat kerja, kondisi dan lokasi lingkungan kerja, peraturan perundang-undangan dan sosial budaya, hak dan kewajiban TKI, prosedur dan kelengkapan dokumen penempatan TKI, biaya-biaya yang dibebankan kepada TKI serta mekanisme pembayarannya dan persyaratan calon TKI.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh calon TKI antara lain :

- a) Merusia minimal 18 tahun, kecuali peraturan negara tujuan yang menentukan usia minimal lebih dari 18 tahun
- b) Memiliki kartu tanda penduduk
- c) Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- d) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat
- e) Memiliki keahlian yang dibutuhkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh instansi yang berwenang
- f) Memiliki surat izin dari orang tua atau wali, suami atau istri
- g) Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara tujuan penempatan

Penempatan tenaga kerja yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebanyak 500 orang yang terdiri dari 4 orang berpendidikan SLTP, 300 berpendidikan SLTA, 12 orang berpendidikan DI-DII, 22 orang berpendidikan D III, 159 orang berpendidikan SI dan 3 orang berpendidikan S2. Berikut daftar nama perusahaan penerima penempatan tenaga kerja.

Kegiatan yang pernah dilakukan pemerintah khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di antaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan antar permintaan dan penawaran tenaga kerja
- b. Mengadakan perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri-industri yang bersifat padat karya, dan program transmigrasi yang ditujukan selain dalam rangka persebaran tenaga kerja, tapi juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan mutu tenaga kerja;
- d. Menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan meningkatkan pendidikan formal, misalnya dengan program wajib belajar;
- e. Menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras, ulet, tekun, serta produktif melalui peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi penduduk;
- f. Mengadakan pelatihan-pelatihan kerja sesuai dengan formasi kerja yang tersedia;
- g. Mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja h. Mendirikan balai-balai latihan kerja.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam merekrut para pencari kerja untuk tahun 2014 yaitu : “Program pelatihan Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja, program pemagangan di perusahaan dan program pemagangan di luar negeri. Hasil pemaparan dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, program kerja yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memperluas kesempatan kerja yaitu : “Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri, Padat

Karya (Infrastruktur dan Produktivitas), Tenaga Kerja Sarjana, pelatihan kewirausahaan, pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Masalah kesempatan kerja merupakan tantangan yang berat, khususnya bagi generasi muda. Persoalan muncul karena pertumbuhan angkatan kerja yang cepat (karena laju pertumbuhan penduduk), yang kurang diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja (Gilarso, 2008).

Analisis Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Membantu Para Pencari Kerja Di Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah berperan dengan baik terlihat dari kurangnya jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Sarolangun berdasarkan data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja, adanya pelatihan ketenagakerjaan dan adanya program penempatan tenaga kerja. selain itu juga Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi telah melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pencari kerja mendaftarkan diri sebagai pencari kerja dengan membuat kartu kuning (AK-1) ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya di Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas. Selanjutnya dinas menginformasikan adanya lowongan pekerjaan atau tidak, jika terdapat lowongan pekerjaan maka dinas dan/atau perusahaan akan melakukan seleksi awal seperti penyeleksian berkas lamaran apakah sesuai dengan syarat yang diberitahukan atau tidak. Setelah seleksi selanjutnya diadakan seleksi akhir berupa wawancara atau tes tertulis. Peserta yang lulus akan ditempatkan pada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut dan pihak perusahaan atau pemberi kerja akan melaporkan jumlah tenaga kerja yang telah direkrut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai laporan.

Jika tidak terdapat lowongan pekerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengadakan pelatihan untuk pencari kerja yang belum memiliki pekerjaan ataupun pencari kerja yang tidak lulus seleksi di perusahaan untuk dilatih. Mereka dilatih dan dibina agar terampil dan kompeten sehingga mereka mampu bersaing di dunia kerja ataupun untuk usaha mandiri. Peserta pelatihan yang tidak mendapatkan pekerjaan akan dibina untuk diarahkan ke usaha mandiri atau wiraswasta.

Hambatan atau kendala dalam proses pelayanan perekrutan para pencari kerja hingga mereka mendapatkan pekerjaan menurut Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas antara lain :

- a. Bahwa lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan atau kompetensi tenaga kerja
- b. Perusahaan tidak menyampaikan lowongan di perusahaan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (perusahaan merekrut sendiri tenaga kerja)
- c. Biasanya perusahaan dalam merekrut tenaga kerja, meminta tenaga kerja yang sudah berpengalaman di bidangnya (sementara kebanyakan dari pencari kerja belum mempunyai pengalaman kerja)
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan bursa kerja online dikarenakan jaringan yang tidak ada (keterbatasan dana)

Selain itu menurut Kepala Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja, kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu : “Pencaker yang datang ke kantor banyak yang tidak mengetahui jam kerja kantor, datangnya jam istirahat jadi petugas tidak melayani secara maksimal karena mereka harus menunggu petugas/pegawai setelah istirahat”. Senada dengan pemaparan di atas menurut Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yaitu : “Hambatan yang sering terjadi yaitu jumlah karyawan yang diminta perusahaan tidak mencukupi dikarenakan persyaratan yang diminta perusahaan tidak sesuai dengan kriteria para pencari kerja misalnya yang diminta orang yang telah berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun”.

Kesimpulan

1. Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja yaitu dengan pelayanan kartu kuning (AK-1), penginformasian lowongan pekerjaan, pelatihan atau pemagangan dan penempatan tenaga kerja.
2. Pelayanan kartu kuning dimulai dari pemohon mengajukan surat permohonan AK-1, kemudian petugas meneliti berkas jika sudah lengkap diagendakan, selanjutnya petugas melakukan wawancara langsung dengan calon pencari kerja, setelah itu petugas membuat kartu AK-1 dan penandatanganan AK-1 oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, kemudian menyerahkan AK-1 kepada pemohon.
3. Informasi ketenagakerjaan dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pasar kerja (Bursa Kerja) dan bursa kerja khusus. Informasi pasar kerja dapat dilihat melalui papan pengumuman yang tersedia di dinas, melalui radio RSPD, dan diberitahu langsung kepada para pencari kerja atau melalui bursa kerja online.
4. Pelatihan dan pemagangan lebih diarahkan untuk para pencari kerja yang putus sekolah atau pencari kerja yang mengikuti seleksi pekerjaan tetapi tidak lulus untuk dilatih dan dibina agar terampil dan berkompeten dan mampu bersaing di dunia kerja. Pelatihan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.
5. Program penempatan tenaga kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun yaitu melaksanakan pelayanan penempatan kerja melalui program Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara. Setiap program penempatan mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Saran

1. Fasilitas pelayanan terutama papan pengumuman Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi perlu diperbaharui dan dengan penataan informasi yang uptodate.
2. Supervisor atau pengawas yang bertanggungjawab pada peserta magang ditentukan secara khusus sehingga tidak mengganggu kesediaan pegawai dalam melakukan pelayanan.
3. Waktu pelayanan sebaiknya sesuai dengan jam pelayanan agar tidak mengurangi kinerja pegawai walaupun pada satu sisi menguntungkan pencari kerja

4. Perhatian atau empati terhadap pencari kerja terutama dalam hal pelayanan informasi tambahan yang seharusnya diketahui oleh pencari kerja sehingga secara psikologis membantu pencari kerja dan dapat membangun hubungan yang harmonis antara pegawai dan pencari kerja.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun. 2013. Sarolangun Dalam Angka. Sarolangun.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun. 2006. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Edy Sutrisno. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Lexy J Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Malayu S.P Hasibuan. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mochammad Rifai. "Informasi Lowongan Kerja". <http://4loker.blogspot.com/2014/02/definisi-lowongan-kerja.html?m=1>. Diunduh 3 April 2015.
- Nia Setyarning. 2010. Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Surakarta, Program Studi Ilmu Administrasi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.
- Peraturan Bupati Sarolangun nomor 29 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Raymond A Noe, dkk. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Mencapai Keunggulan Bersaing. Jakarta : Salemba Empat.
- Sadono Sukirno. 2012. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya manusia. Bandung : Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sondang P Siagian. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- T. Gilarso . 2008. Pengantar Ilmu ekonomi Makro. Yogyakarta : Kanisius Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.